



Proyek JLNT Diplot Untuk Pengusaha Tertentu

DESAKKAN rencana pembatalan pembangunan megaprojek tujuh Jalan Layang Non Tol (JLNT) yang akan dibangun di Ibu Kota semakin menguat. Kali ini datang dari Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu. Menurut Victor, dugaan proyek sudah diplot untuk pengusaha tertentu, tanpa dilakukan lelang melalui *e-budgeting*, menyalahi aturan yang ada. "Harusnya proyek ini segera dihentikan. Kalau tetap memaksakan, jelas-jelas menyalahi aturan," ujar Victor kepada INDOPOS, Kamis (22/1).

Victor juga mengatakan, fungsi *e-budgeting* yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, adalah untuk melelang semua proyek di Pemprov DKI. Tidak terkecuali proyek pembangunan tujuh JLNT yang akan direncanakan di bangun dalam waktu dekat ini.

"Kalau proyek itu tetap dilaksanakan, lebih baik *e-budgeting* dibubarkan saja. Karena ada indikasi pilih-pilih proyek," cetusnya juga. Lebih jauh, Victor menduga, pembangunan JLNT dilaksanakan untuk memenuhi selera pemodal. Karena memang tidak bisa digunakan mengatasi kemacetan.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kejaksaan harus turun tangan menelaah kasus ini," ungkapnyanya juga. Dia juga menegaskan, tidak boleh ada pemodal atau pengusaha yang diistimewakan dalam proyek di Ibu Kota ■

Sementara itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, mengaku kurang setuju dengan pembangunan JLNT dengan tujuan mengurangi kemacetan. Dia mencontohkan, 2 JLNT Tanahabang-Kampung Melayu, dan Blok-M-Prapanca, yang dibangun beberapa tahun lalu ternyata tidak akan mampu mengurangi kemacetan di Jakarta.

Menurutnya, kemacetan hanya terurai sesaat atau saat kendaraan di atas JLNT. Tapi saat kendaraan turun lagi maka efek kemacetan kembali terjadi. "Efek mengurangi kemacetan dari JLNT hanya berlangsung sementara. Kemacetan akan terjadi lagi di wilayah itu," terangnya.

Dijelaskan Joga juga, di negara mana pun pembangunan dan penambahan jalan bukanlah sebuah solusi untuk mengurangi kemacetan. Kebijakan tersebut justru menambah ruang untuk pergerakan kendaraan pribadi yang malah akan menambah kemacetan baru.

"Di Seoul (Korea Selatan, Red) yang dilakukan justru pemerintahnya membongkar jalan tol dalam kota dan diubah menjadi jalur hijau. Tapi justru di Jakarta jalur hijaunya dibuat menjadi jalan tol. Ini terbalik," cetusnya juga. Paling tidak menurut Joga, semestinya pemerintah

lebih mengutamakan pembuatan kebijakan yang bersifat paralel dalam mengurangi mata rantai kemacetan.

Seperti mempercepat kebijakan pembatasan kendaraan di jalur protokol dengan kebijakan jalan berbayar atau biasa disebut Electronic Road Pricing (ERP). "Harus ada yang paralel seperti penambahan bus, revitalisasi kereta api, setelah itu disusul kebijakan ERP yang akan membuat pengendara pribadi di jalan protokol beralih ke transportasi umum," tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, proyek JLNT akan menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Yakni, anggaran untuk proyek JLNT Permata Hijau bernilai Rp 137,04 miliar; JLNT Bintaro Rp 131,54 miliar; JLNT Cipinang Lontar Rp 135 miliar; JLNT Jalan Panjang Rp 132,55 miliar; JLNT Kartini Rp 133,65 miliar; JLNT Cendrawasih Rp 130,42 miliar dan JLNT Kuningan Rp 134,52 miliar.

Untuk proyek itu, Dinas PU DKI sudah mengikat kontrak dengan pihak ketiga untuk membangun JLNT, dan rencananya dimulai pada 2015 dan selesai dua tahun mendatang atau 2017. Sayangnya, setelah ditelusuri pengikatan kontrak dengan pihak ketiga diduga tidak melalui proses lelang, melainkan diplot atau ditunjuk langsung. (wok)